KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Istana Tolak Gedung Baru
Tanggal : Jumat, 21 Agustus 2015
Surat Kabar : Republika
Halaman : 4

Istana Tolak Gedung Baru DPR

● HALIMATUS SA'DIYAH

Sudah ada rapat antarpimpinan DPR untuk pembangunan gedung.

JAKARTA — Istana memberi sinyal penolakan usulan pembangunan tujuh gedung baru di Kompleks DPR, Jakarta. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut, kondisi APBN saat ini tak memungkinkan untuk membangun proyek tersebut.

"Dalam kondisi seperti ini, ruang anggaran kita tidak terlalu fleksibel untuk itu," kata dia di Jakarta, Kamis (20/8). Kendati begitu, Pramono menyebut bahwa Presiden telah meminta menteri-menteri terkait melakukan kajian atas permintaan dewan. Sebelum Presiden membuat keputusan, dia menjelaskan, harus terlebih dahulu ada kajiannya.

Pramono juga memastikan bahwa pemerintah belum pernah mengirim surat persetujuan pembangunan gedung baru pada DPR. Surat persetujuan itu, sambung dia, hanya ada jika berkaitan dengan Badan Anggaran (Banggar) dan pembahasan di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) di DPR. Lazimnya, tutur Pramono, akan muncul dari Menteri Keuangan.

"Saya yakin, menteri keuangan dalam hal seperti ini akan berkonsultasi dengan Presiden," kata Pramono. Berbicara terpisah, mantan menteri perencanaan pembangunan nasional Andrinof Chaniago menyatakan, tak ada rencana pembangunan gedung baru DPR.

Oleh karena itu, pemerintah pun tak pernah menganggarkan dana untuk proyek yang ditaksir menelan anggaran Rp 1 triliun tersebut. "Memang tidak ada di rencana," ujarnya, kemarin.

DPR mewacanakan pembangunan megaproyek gedung DPR. Wacana ini mencuat dengan dalih gedung DPR dibangun pertama kali bukan untuk parlemen, melainkan tempat Conference of New Emerging Forces (CONEFO) bersidang di zaman kekuasaan Presiden Sukarno. Sehingga, kini gedung tersebut patut diperluas.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengakui, wacana perluasan gedung DPR cukup beralasan. Namun, dia menegaskan, proyek yang terdiri atas tujuh *spot* tersebut belum masuk ke RAPBN 2016.

Selain itu, politikus PAN itu melanjutkan, sampai saat ini Badan Anggaran (Banggar) DPR masih dalam tahapan mendengar pandangan umum fraksi-fraksi, belum menyentuh soal perlunya memasukkan tujuh proyek DPR RI.

"Jadi, saya belum bisa mengatakan, apakah itu sudah disetujui atau belum. Karena, sampai sekarang, dari Banggar belum membahas itu (pembangunan gedung baru DPR)," ucap Taufik Kurniawan di, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, dia menyebutkan, sudah ada rapat konsultasi antarpimpinan fraksi yang membahas wacana perluasan dan modernisasi gedung DPR. Rapat itu, lanjut Taufik, berusaha menggali perihal potensi kelayakan perluasan gedung, standardisasi, dan kemungkinan kajian lain.

Saat Banggar sampai membahas pembangunan gedung DPR, ujarnya, sudah tersedia data pendukung yang lengkap. "Tentunya, itu masih secara umum," sambung dia.

Dia mengatakan, sampai sekarang belum ada pembahasan dengan pemerintah terkait anggaran pembangunan gedung baru DPR. Meski demikian, dia menyebut, Presiden Joko Widodo mengapresiasi wacana ini.

Ketua DPR Setya Novanto sempat mengatakan, pada masa sidang III Tahun 2014-2015 telah membentuk tim kerja pembangunan perpustakaan, museum, pusat penelitian, dan ruang kerja anggota serta tenaga ahli DPR RI. "Pembangunan tersebut akan menjadi ikon nasional bagi bangsa Indonesia," katanya.

■ c14/antara **ed:** a syalaby ichsan